



The Co-Design Curriculum Mandate Policy Addresses the Misalignment Between Vocational Madrasah Aliyah Graduates and Industry Needs

Kebijakan Mandat Desain Bersama Kurikulum Atasi Ketidakselarasan Lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan dengan Kebutuhan Industri

Unwan Maika

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Author Correspondence Email: unwan12@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 8 th , 2026)	Accepted (June 8 th , 2026)
------------------------	---	---	---

News Article

Keyword:

*Adaptation;
Competitiveness
curriculum;
Policy;
Misalignment;*

Abstract

The low competitiveness of Vocational Madrasah Aliyah (MAK) graduates in the labor market is a strategic issue rooted in the misalignment of competencies with current industrial needs. This mismatch phenomenon is exacerbated by the slow pace of adaptation to technological disruption as well as bureaucratic procedures and national standardization that tend to be rigid in responding to market dynamics. This analysis aims to formulate policy transformation to enhance practical skills and graduate relevance through the strengthening of adaptive and flexible curricula. The policy methodology applied in this study utilizes a qualitative approach based on literature review and legislative analysis to dissect the vocational education regulatory framework. The problem identification process is conducted through priority assessment instruments using Urgency, Seriousness, and Growth (USG) criteria to identify the most crucial root causes. Furthermore, various policy alternatives are evaluated in depth using criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and appropriateness to ensure the generated recommendations possess a strong implementation basis. The findings indicate that a policy mandating the co-design of the curriculum between madrasah institutions and industrial associations is a fundamental solution to shift the educational paradigm from supply-based to labor market demand-driven. The primary recommendation in this policy paper is to urge the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia to issue regulations requiring the synchronization of operational curricula with industrial stakeholders as an absolute prerequisite for document legality. This step is expected to eliminate static administrative barriers, enable the integration of cutting-edge expertise modules, and ensure graduates possess technical proficiency recognition aligned with global standards, thereby significantly increasing graduate competitiveness amidst an increasingly competitive digital economic landscape.

Kata Kunci:

Adaptasi;
Daya Saing;
Kurikulum;
Kebijakan;
Ketidakselarasan.

Abstrak

Rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di pasar kerja merupakan isu kebijakan krusial yang dipicu oleh ketidakselarasan kompetensi dengan kebutuhan industri serta lambatnya adaptasi kurikulum terhadap disrupsi teknologi di era Industri 4.0. Masalah sistemik ini diperparah oleh prosedur birokrasi dan standarisasi nasional yang kaku, yang sering kali menghambat kreativitas institusional dalam merespons dinamika lapangan kerja secara lincah. Makalah kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi intervensi guna meningkatkan relevansi dan keterserapan lulusan melalui reformasi struktur kurikulum. Metodologi yang diterapkan adalah analisis kebijakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis perundang-undangan. Proses identifikasi masalah dilakukan menggunakan metode *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG) untuk menentukan prioritas intervensi, sementara pemilihan alternatif kebijakan didasarkan pada kriteria evaluasi William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Landasan teoritis dalam kajian ini mengintegrasikan *Human Capital Theory*, *Skill-Biased Technological Change*, dan *Institutional Theory*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa solusi fundamental terletak pada transformasi paradigma kurikulum dari berbasis pasokan (*supply-driven*) menjadi berbasis kebutuhan pasar (*demand-driven*). Artikel ini merekomendasikan kebijakan mandat desain bersama (*co-design*) kurikulum antara pihak madrasah dengan asosiasi industri atau praktisi ahli sebagai prasyarat mutlak validasi dokumen operasional madrasah. Melalui regulasi ini, Madrasah Aliyah Kejuruan dapat menyusun modul keahlian yang fleksibel dan adaptif, sehingga setiap unit kompetensi yang diajarkan memiliki legitimasi langsung dari dunia kerja. Implementasi kebijakan ini diprediksi mampu memperkecil kesenjangan keahlian, meningkatkan nilai tawar lulusan dalam bursa kerja global, serta memastikan pendidikan madrasah tetap relevan di tengah percepatan teknologi.

To cite this article: Unwan Maika. (2026). "The Co-Design Curriculum Mandate Policy Addresses the Misalignment Between Vocational Madrasah Aliyah Graduates and Industry Needs". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 141 – 168.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pemanfaatan bonus demografi Indonesia, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi penentu daya saing bangsa di kancah global. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan vokasi dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang memiliki keahlian spesifik ([Nainggolan & Budiman, 2024](#)).

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) memegang peranan unik karena mengemban mandat ganda: mencetak lulusan yang memiliki kedalaman spiritualitas keagamaan sekaligus keunggulan teknis profesional. Namun, dalam realitasnya, terdapat jurang pemisah yang lebar antara profil lulusan yang dihasilkan dengan ekspektasi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) (Affandi, 2025).

Fenomena rendahnya daya saing lulusan MAK tercermin dari tingginya angka pengangguran terbuka di sektor vokasi. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pendidikan yang dilakukan belum mampu dikonversi menjadi modal manusia (*human capital*) yang produktif di pasar kerja ([Us'an & Unaimah Sanaya, 2026](#)).

Masalah mendasar yang muncul adalah rendahnya penguasaan keahlian praktis oleh siswa MAK. Keterampilan motorik dan penguasaan teknologi yang menjadi syarat mutlak di dunia kerja sering kali tidak tercapai selama masa pendidikan di madrasah ([Affandi, 2025](#)).

Kekurangan keahlian praktis ini bukan sekadar masalah teknis instruksional, melainkan masalah kebijakan yang bersifat sistemik. Salah satu akar masalah utama adalah ketidakselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, atau yang lazim disebut sebagai fenomena *mismatch* ([Ardhana dkk., 2025a](#)).

Kurikulum yang digunakan di MAK saat ini cenderung bersifat *supply-driven*, di mana penentuan kompetensi lebih banyak didasarkan pada ketersediaan tenaga pendidik dan sarana yang ada di madrasah. Pendekatan ini mengabaikan dinamika permintaan tenaga kerja yang sebenarnya di lapangan ([Taufik Bk, 2020](#)).

Akibatnya, materi yang diajarkan di kelas sering kali tidak relevan dengan standar operasional yang berlaku di perusahaan modern. Lulusan MAK sering kali harus menjalani pelatihan ulang dari nol saat diterima bekerja, yang menunjukkan inefisiensi proses pendidikan vokasi ([Muhammad Zulqarnain dkk., 2025](#)).

Selain masalah relevansi, tantangan besar lainnya adalah lambatnya adaptasi kurikulum terhadap disrupsi teknologi. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peta kebutuhan keterampilan secara radikal melalui otomatisasi dan digitalisasi ([Jaya dkk., 2025a](#)).

Pendidikan vokasi yang statis akan tertinggal oleh kecepatan inovasi di sektor swasta. Di MAK, integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, internet untuk segala (IoT), dan robotika masih sangat minim, sehingga lulusan merasa gagap saat berhadapan dengan peralatan industri terkini ([Latifah dkk., 2024](#)).

Lambatnya adaptasi ini diperparah oleh prosedur birokrasi dan standarisasi nasional yang kaku. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sering kali diimplementasikan sebagai aturan administratif yang membelenggu kreativitas dan inovasi di tingkat satuan pendidikan ([Badrudin dkk., 2024](#)).

Struktur birokrasi yang sentralistik membuat setiap perubahan materi ajar harus melalui jalur birokrasi yang panjang di tingkat kementerian. Hal ini menciptakan jeda waktu yang lama antara munculnya tren teknologi baru dengan pengesahan kurikulum di madrasah ([Syafii, 2025](#)).

Selain itu, terdapat dualisme regulasi yang sering kali membingungkan pengelola MAK. Sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, MAK harus menyelaraskan diri dengan standar teknis dari Kemendikbudristek sekaligus standar keagamaan dari Kemenag ([Muhamad Ripin Ikwandi, 2022](#)).

Kondisi ini menyebabkan beban kurikulum di MAK menjadi sangat berat. Siswa diwajibkan menguasai muatan normatif-adaptif (keagamaan dan umum) yang luas, namun di sisi lain harus mencapai standar kompetensi kerja nasional yang menuntut jam praktik tinggi ([Kailani, 2021](#)).

Ketimpangan porsi muatan ini mengakibatkan waktu efektif untuk praktik kejuruan tereduksi. Siswa lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kelas untuk mengejar

ketuntasan materi teoritis daripada berada di bengkel atau laboratorium untuk mengasah keterampilan motorik mereka ([Bue dkk., 2025](#)).

Model penjadwalan yang tradisional juga menjadi penghambat. Pembelajaran yang terfragmentasi dalam durasi singkat menyulitkan siswa untuk mencapai tingkat kemahiran (*mastery*) dalam satu unit kompetensi praktis yang kompleks ([Yaqin, 2018](#)).

Lemahnya kemitraan strategis dengan sektor swasta juga menjadi variabel penyebab yang signifikan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) sering kali hanya dipandang sebagai syarat administratif tanpa adanya transfer pengetahuan yang substansial dari praktisi industri kepada siswa ([Ismayanti dkk., 2025](#)).

Tanpa keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum (*co-design*), sekolah akan terus meraba-raba tentang kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Industri bukan hanya pengguna lulusan, tetapi seharusnya menjadi mitra dalam mendefinisikan standar kelulusan itu sendiri (D. A. K. Putri dkk., 2026).

Masalah ini memiliki dampak ekonomi yang serius, terutama di daerah berkembang seperti Lampung. Rendahnya keterserapan lulusan MAK di industri lokal mengakibatkan pemborosan potensi sumber daya manusia muda yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah ([Susanti & Erlin Kurniati, 2025](#)).

Secara teoretis, kegagalan ini dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory*. Jika pendidikan tidak memberikan keterampilan yang memiliki nilai pasar, maka individu tersebut tidak akan memiliki daya tawar ekonomi yang memadai (D. Wulandari & Woyanti, 2023).

Selain itu, konsep *Skill-Biased Technological Change* (SBTC) mengingatkan bahwa teknologi hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki keterampilan adaptif. Lulusan MAK yang dibekali dengan kurikulum usang akan menjadi korban dari perubahan teknologi tersebut (Fathurrahman dkk., 2024a).

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mampu mendobrak kekakuan birokrasi. Kebijakan "Agile Curriculum" atau kurikulum yang lincah menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons disrupsi teknologi secara *real-time* ([Sya'roni dkk., 2025](#)).

Desentralisasi otoritas dalam validasi kurikulum harus dilakukan. Memberikan ruang bagi daerah dan madrasah untuk menyesuaikan 20-30% materi ajar dengan kebutuhan industri lokal merupakan langkah strategis untuk mengurangi *mismatch* ([Bukit, 2021](#)).

Integrasi antara mata pelajaran umum dan kejuruan juga harus ditingkatkan. Matematika atau Bahasa Inggris di MAK tidak boleh diajarkan secara abstrak, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan kebutuhan praktis profesi masing-masing siswa ([Delfia Herwanis dkk., 2024](#)).

Dukungan regulasi sebenarnya sudah tersedia melalui Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat madrasah masih memerlukan panduan teknis yang lebih berani dalam memberikan otonomi kurikulum.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, perlu memperkuat mandat *co-design* kurikulum. Industri tidak boleh lagi hanya menjadi tempat magang, tetapi harus dilibatkan sebagai penentu kebijakan instruksional di dalam madrasah ([Kasturi dkk., 2025](#)).

Peningkatan kompetensi digital guru MAK juga merupakan kunci. Tanpa guru yang memiliki budaya belajar mandiri dan adaptif terhadap teknologi, perubahan kurikulum di atas kertas tidak akan pernah sampai ke tangan siswa ([Triyunita dkk., 2025](#)).

Penyediaan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi di tingkat madrasah akan membantu pengelola dalam memetakan tren keahlian masa depan. Hal ini akan mengubah cara pandang dari sekadar meluluskan siswa menjadi memastikan keterserapan siswa ([Teguh Gunawan dkk., 2022](#)).

Secara sosiologis, perbaikan kualitas praktis di MAK akan meningkatkan citra madrasah di mata masyarakat. MAK tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua setelah SMK, melainkan institusi unggulan yang mampu mencetak teknokrat yang berakhlak mulia ([Nurhadi, 2021](#)).

Sebagai kesimpulan, rendahnya daya saing lulusan MAK adalah alarm bagi sistem pendidikan kita. Tanpa perubahan radikal dalam struktur kurikulum dan fleksibilitas birokrasi, lulusan kita hanya akan menjadi penonton dalam pertumbuhan industri di tanah air ([Rustandi & Rosmiati, 2022](#)).

Rekomendasi kebijakan melalui mekanisme *co-design* kurikulum bersama industri adalah solusi konkret untuk menjembatani jurang kompetensi ini. Dengan demikian, MAK benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pencetak sumber daya manusia yang kompetitif dan relevan di era digital (Hertanto, 2026a).

Selain aspek teknis (*hard skills*), rendahnya daya saing lulusan MAK juga dipicu oleh pengabaian terhadap pengembangan keterampilan non-teknis atau *soft skills*. Dalam ekosistem industri modern, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan bekerja dalam tim lintas budaya menjadi prasyarat utama. Kurikulum yang terlalu padat dengan hafalan teori sering kali mematikan ruang bagi siswa untuk mengasah kecerdasan emosional yang sangat dihargai oleh pemberi kerja ([Wibowo, 2016](#)).

Ketertinggalan dalam literasi digital dasar juga menjadi faktor penghambat yang bersifat fundamental. Literasi digital bukan sekadar mampu menggunakan perangkat lunak standar, melainkan kemampuan untuk beradaptasi dengan alur kerja berbasis data dan platform kolaborasi daring. Tanpa fondasi digital yang kuat, lulusan MAK akan kesulitan mengikuti ritme industri yang kini bergerak menuju digitalisasi total di semua lini operasional ([Sari dkk., 2025](#)).

Masalah ini juga berkaitan erat dengan lemahnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang ditanamkan sejak dini. Seharusnya, pendidikan vokasi di madrasah mampu menjadi inkubator bagi lahirnya wirausahawan muda yang mandiri. Namun, dominasi kurikulum yang kaku membuat orientasi lulusan hanya terpaku pada pencarian kerja di perusahaan besar, padahal kapasitas serap sektor formal memiliki keterbatasan ([Wagner, 2014](#)).

Secara regional, tantangan ini semakin nyata di wilayah seperti Lampung, yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis agrikultur dan logistik. Kurikulum MAK yang bersifat nasional sering kali gagal menangkap kebutuhan spesifik industri lokal di Lampung. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kompetensi yang "klik" dengan rantai pasok ekonomi di daerahnya sendiri, sehingga mereka terpaksa bermigrasi ke kota besar tanpa bekal yang cukup (Agustian dkk., 2024a).

Hambatan lain terletak pada sistem penjaminan mutu internal madrasah yang masih bersifat administratif. Akreditasi madrasah cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen fisik dan fasilitas gedung, daripada melakukan pelacakan (*tracer study*) terhadap keterserapan dan kepuasan industri terhadap lulusan. Tanpa data *tracer study* yang akurat, madrasah tidak pernah tahu di mana letak kelemahan nyata dari kompetensi lulusannya ([Rofaida & Gautama, 2019](#)).

Kesenjangan ini juga diperlebar oleh minimnya program "Guru Magang di Industri". Banyak pengajar kejuruan di MAK tidak pernah merasakan langsung tekanan dan kemajuan teknologi di lantai pabrik atau kantor modern selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan adanya diskoneksi informasi antara apa yang diajarkan guru di kelas dengan apa yang sebenarnya terjadi di dunia kerja saat ini ([M. N. Wulandari & Mariyam, 2025](#)).

Dalam perspektif global, kegagalan dalam merevitalisasi pendidikan vokasi di madrasah akan menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) dan nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk naik menjadi negara maju jika angkatan kerja mudanya, termasuk lulusan MAK, hanya memiliki keterampilan level rendah ([Safitri dkk., 2022](#)).

Kekakuan standarisasi juga berdampak pada rendahnya pengakuan sertifikasi profesi. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sering kali dianggap tidak memiliki "gigi" oleh industri karena proses pengujiannya tidak melibatkan asesor dari praktisi. Tanpa sertifikat kompetensi yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, lulusan MAK akan terus berada di barisan belakang dalam seleksi rekrutmen ([Raskadi, 2023](#)).

Fenomena ini jika dibiarkan akan menciptakan "generasi yang hilang" (*lost generation*), di mana pemuda memiliki ijazah formal namun tidak memiliki fungsi ekonomi yang relevan. Hal ini berpotensi memicu masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka pengangguran terdidik dan ketimpangan ekonomi yang makin tajam di masyarakat. Reformasi kurikulum bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan demi kelangsungan masa depan siswa ([Kamila dkk., 2025](#)).

Transformasi menuju kurikulum yang adaptif memerlukan keberanian birokrasi untuk memberikan otonomi lebih besar kepada kepala madrasah. Kepala madrasah harus mampu bertindak sebagai manajer yang lincah dalam menjalin komunikasi dengan dunia usaha, bukan sekadar pelaksana instruksi teknis dari pusat. Fleksibilitas ini adalah kunci utama agar MAK bisa bergerak seirama dengan derap langkah industri ([Slamet Pamuji & Ilzam Habik, 2026](#)).

Perlu ditekankan bahwa keberhasilan kebijakan *co-design* kurikulum akan sangat bergantung pada kemauan industri untuk membuka pintu kolaborasi. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi industri agar mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mendidik calon tenaga kerja masa depan. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan ([Dwi Septian dkk., 2025](#)).

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian latar belakang ini, urgensi kebijakan ini bukan hanya soal statistik pekerjaan, melainkan soal memuliakan martabat manusia melalui keahlian yang bermanfaat. Dengan kurikulum yang selaras, lulusan MAK tidak hanya akan menjadi penonton di negerinya sendiri, melainkan menjadi aktor utama yang kompetitif, berdaya saing global, dan tetap teguh pada nilai-nilai karakter luhur yang menjadi ciri khas madrasah ([Disas, 2018](#)).

Identifikasi Masalah

Bermula dari rendahnya keterserapan lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan di pasar kerja yang menunjukkan adanya diskoneksi antara proses pendidikan dengan realitas kebutuhan dunia usaha. Meskipun sektor vokasi dirancang sebagai mesin pencetak

tenaga kerja siap pakai, faktanya lulusan masih terjebak dalam kesenjangan kompetensi yang menghambat mereka untuk bersaing secara global. Permasalahan ini dipicu oleh kurikulum yang bersifat statis dan tidak selaras dengan standar industri terkini, yang kemudian menyebabkan lambatnya integrasi teknologi digital ke dalam ruang kelas sebagai respons terhadap disrupsi global. Di sisi lain, kekakuan prosedur birokrasi dan standarisasi nasional sering kali menjadi penghambat utama bagi madrasah untuk melakukan inovasi materi ajar secara lincah, sehingga menciptakan inersia institusional yang melestarikan ketidaksesuaian tersebut dan menempatkan lulusan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam ekosistem ekonomi modern. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai masalah antara lain:

1. Ketidakselarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri (*Mismatch*)

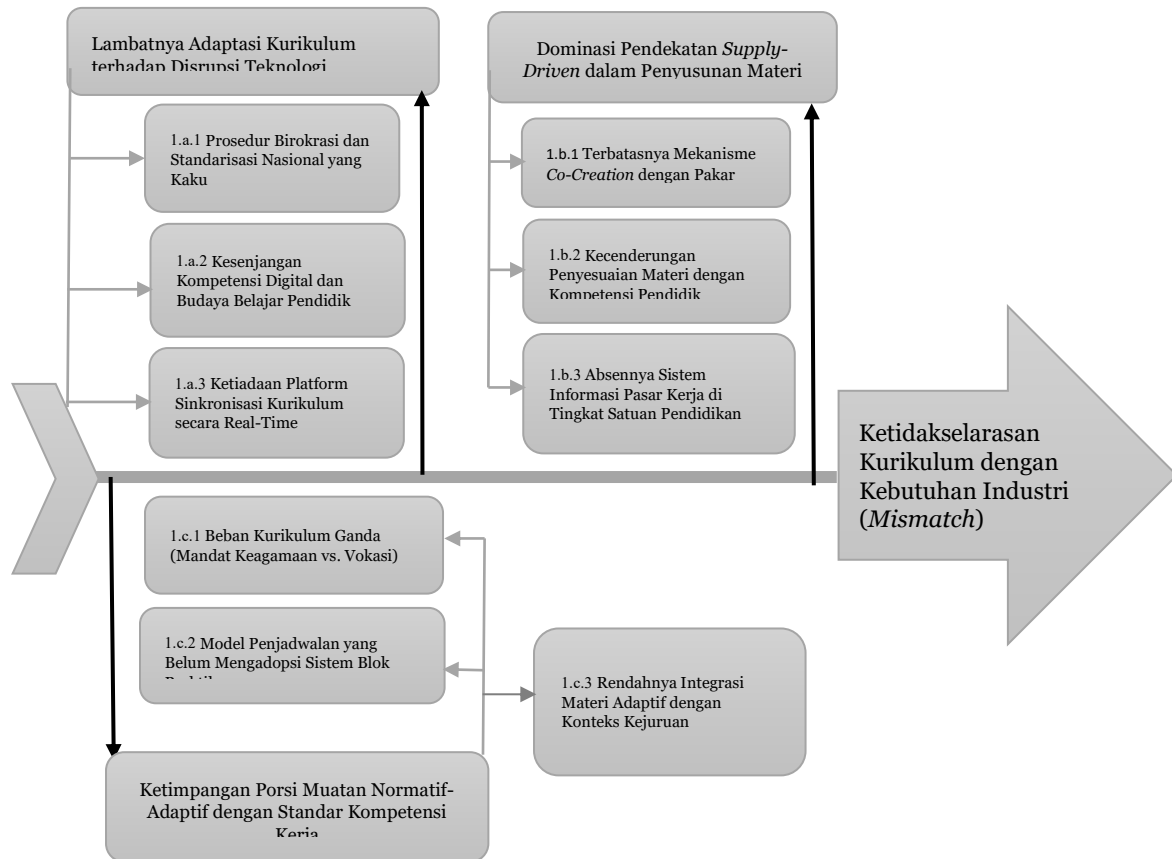
Kurikulum pada Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) sering kali terlalu fokus pada aspek teoritis dan keagamaan, sehingga porsi penguatan kompetensi teknis yang dibutuhkan pasar kerja menjadi terpinggirkan. Selain itu, pembaruan kurikulum cenderung lambat dibandingkan dengan akselerasi teknologi di dunia industri. Akibatnya, apa yang dipelajari di kelas sering kali sudah usang saat siswa lulus ([Alfianto & Sutrisno, 2025](#)).

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Praktik

Banyak Madrasah Aliyah Khusus (MAK) menghadapi kendala dalam penyediaan laboratorium, bengkel kerja, dan alat praktik yang sesuai standar industri terkini. Tanpa fasilitas yang memadai, siswa tidak mendapatkan pengalaman *hands-on* yang cukup untuk mengasah keterampilan motorik dan teknis mereka, sehingga mereka merasa gagap saat menghadapi peralatan nyata di tempat kerja ([Andhika & Hamdi, 2024](#)). Tantangan pemenuhan sarana prasarana pendidikan vokasi dalam meningkatkan keterampilan [siswa \(Fitriani dkk., 2022\)](#).

3. Lemahnya Kemitraan Strategis dengan Sektor Swasta (*Link and Match*)

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di MAK sering kali hanya bersifat formalitas administratif tanpa adanya transfer keahlian yang substansial. Kurangnya kolaborasi dengan industri dalam penyusunan kurikulum dan sertifikasi kompetensi membuat lulusan MAK sulit mendapatkan pengakuan atas keahlian mereka oleh perusahaan ([Maryani dkk., 2025](#)).



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Ketidakselarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri (<i>Mismatch</i>)	5	5	5	15
2	Lemahnya Kemitraan Strategis dengan Sektor Swasta (<i>Link and Match</i>)	5	4	5	14
3	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Praktik	4	4	3	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Ketidakselarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri (*Mismatch*)). Masalah ini menjadi prioritas utama karena Intervensi kebijakan harus dimulai dari pembenahan kurikulum yang adaptif dan fleksibel agar dapat mengikuti dinamika industri secara *real-time*, sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing dan keterserapan lulusan MAK di dunia kerja. Jika kurikulum sudah benar dan adaptif, maka kebutuhan akan kemitraan dan sarana prasarana akan mengikuti secara otomatis sebagai instrumen pendukung kurikulum tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah Rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di pasar kerja berakar pada ketidakselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri (*mismatch*) yang disebabkan oleh lambatnya adaptasi terhadap disrupsi teknologi..

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Kajian kebijakan ini disusun dengan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Menganalisis Akar Masalah: Mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang menyebabkan rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), khususnya terkait fenomena *mismatch* kompetensi dan inersia birokrasi.

Tujuan ini diarahkan untuk melakukan diagnosis mendalam terhadap "penyakit" kronis dalam sistem pendidikan vokasi di madrasah, di mana ijazah formal tidak lagi menjadi jaminan kompetensi di pasar kerja. Melalui analisis ini, kajian tidak hanya melihat fenomena permukaan seperti tingginya angka pengangguran lulusan, tetapi membedah faktor-faktor fundamental mulai dari kurikulum yang bersifat *supply-driven* hingga hambatan birokrasi yang melahirkan inersia institusional. Dengan memahami akar masalah secara jernih—baik dari sudut pandang ekonomi modal manusia maupun hambatan administratif—kita dapat memastikan bahwa solusi yang ditawarkan nantinya benar-benar menasar pada titik lemah sistemik dan bukan sekadar perbaikan yang bersifat kosmetik atau sementara.

2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Menilai berbagai pilihan intervensi regulasi menggunakan kriteria William N. Dunn untuk menentukan solusi yang paling efektif, efisien, dan layak diterapkan di lingkungan madrasah.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan penimbangan yang objektif terhadap berbagai pilihan intervensi regulasi guna meminimalisir risiko kegagalan kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kriteria evaluasi yang diakui secara akademik, proses ini memastikan bahwa alternatif yang dipilih, seperti mandat *co-design* kurikulum atau sertifikasi modular, telah teruji dari aspek efektivitas, efisiensi, dan responsivitasnya terhadap disrupsi teknologi. Evaluasi ini menjadi filter kritis agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga memiliki kelayakan operasional yang tinggi dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh pengelola madrasah serta kebutuhan spesifik industri di wilayah regional.

3. Merumuskan Rekomendasi Strategis: Menyusun draf rekomendasi kebijakan berupa mandat desain bersama (*co-design*) kurikulum antara madrasah dan industri sebagai landasan transformasi pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Agama.

Tujuan utama dari kajian ini adalah menghasilkan draf rekomendasi kebijakan yang konkret dan berdaya ikat, yang dapat diimplementasikan oleh pengambil keputusan di tingkat Kementerian Agama. Narasi dalam rekomendasi ini difokuskan pada pergeseran paradigma dari model standarisasi kaku menuju model kemitraan strategis yang mewajibkan keterlibatan industri dalam setiap fase pengembangan pendidikan. Dengan merumuskan mandat kebijakan yang jelas, diharapkan tercipta sebuah payung hukum yang memaksa terjadinya sinkronisasi antara dunia

pendidikan dan dunia kerja. Langkah ini bertujuan untuk meruntuhkan tembok pemisah antara teori di kelas dengan praktik di lapangan, sehingga setiap lulusan madrasah memiliki profil kompetensi yang presisi dan diakui secara profesional.

4. Akselerasi Adaptasi Teknologi: Memberikan arah kebijakan bagi integrasi modul keahlian mutakhir guna merespons disrupsi teknologi secara cepat dan sistematis.

Kajian ini berupaya memberikan arah kebijakan yang mampu mentransformasi kurikulum MAK menjadi entitas yang hidup dan tangkas (*agile*) dalam merespons kecepatan disrupsi global. Mengingat laju teknologi yang sering kali melampaui siklus perubahan kebijakan nasional, tujuan ini menekankan pada penciptaan mekanisme yang memungkinkan pembaruan modul keahlian secara instan tanpa terhambat oleh prosedur administrasi yang panjang. Melalui akselerasi ini, pendidikan vokasi di madrasah diharapkan tidak lagi menjadi pengikut pasif dari kemajuan teknologi, melainkan mampu menjadi garda depan dalam mencetak tenaga kerja yang literat digital dan memiliki daya adaptasi tinggi. Fokusnya adalah memastikan bahwa "masa kadaluwarsa" keahlian siswa dapat diminimalisir melalui integrasi teknologi terbaru ke dalam struktur inti pembelajaran secara berkelanjutan.

Manfaat Kajian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Bagi Pengambil Kebijakan (Kementerian Agama RI)

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi saintifik dalam merumuskan regulasi terbaru mengenai implementasi kurikulum MAK yang lebih adaptif, serta sebagai pedoman dalam menyinergikan standar nasional pendidikan dengan standar kebutuhan industri.

Bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama, kajian ini berfungsi sebagai instrumen navigasi strategis dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja yang bergerak sangat dinamis. Dengan menyediakan analisis berbasis bukti (*evidence-based*) mengenai celah antara kebijakan nasional dan realitas operasional, naskah ini memberikan justifikasi kuat bagi perlunya reformasi standar kurikulum yang tidak lagi kaku. Manfaat utamanya adalah tersedianya kerangka hukum yang mampu mengharmonisasikan aspek keagamaan dengan tuntutan teknis industri, sehingga kebijakan yang dilahirkan memiliki dampak nyata dalam menekan angka pengangguran terdidik dan meningkatkan efektivitas investasi pendidikan secara nasional.

2. Manfaat Bagi Satuan Pendidikan (Madrasah Aliyah Kejuruan)

Memberikan kerangka kerja operasional bagi pengelola madrasah dalam membangun kemitraan strategis dengan dunia industri, sehingga madrasah memiliki otonomi yang terukur dalam melakukan sinkronisasi materi ajar sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar.

Di tingkat satuan pendidikan, kajian ini memberikan manfaat berupa panduan operasional bagi pengelola madrasah untuk keluar dari jebakan inersia birokrasi dan administrasi yang statis. Melalui konsep desain bersama (*co-design*) yang ditawarkan, MAK mendapatkan legitimasi dan metode praktis dalam membangun kemitraan yang substansial dengan dunia industri, melampaui sekadar kesepakatan

seremonial di atas kertas. Hal ini memungkinkan madrasah untuk mengembangkan identitas keunggulan kompetitif yang unik dan selaras dengan potensi ekonomi lokal, sehingga institusi pendidikan vokasi madrasah dapat bertransformasi menjadi pusat pengembangan bakat yang lincah dan diakui kualitasnya oleh sektor swasta.

3. Manfaat Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Menciptakan ekosistem kolaborasi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), di mana industri mendapatkan pasokan tenaga kerja yang memiliki kompetensi presisi, sehingga dapat menekan biaya pelatihan ulang (*re-training*) bagi karyawan baru.

Bagi dunia usaha dan dunia industri, kajian ini membuka jalan bagi terciptanya ekosistem kolaborasi yang saling menguntungkan melalui penyediaan pasokan tenaga kerja yang memiliki kompetensi presisi. Dengan keterlibatan industri dalam fase perancangan kurikulum, perusahaan tidak lagi perlu mengeluarkan investasi besar dan waktu yang lama untuk proses pelatihan ulang (*re-training*) bagi karyawan baru yang berasal dari lulusan MAK. Manfaat jangka panjangnya adalah terciptanya rantai pasok talenta yang handal, di mana industri mendapatkan akses langsung terhadap calon tenaga kerja yang sudah memiliki pemahaman mendalam terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan budaya kerja modern sejak dari bangku sekolah.

4. Manfaat Bagi Peserta Didik dan Lulusan

Meningkatkan relevansi keahlian praktis dan portofolio kompetensi lulusan MAK, yang secara langsung akan memperpendek masa tunggu kerja dan meningkatkan nilai tawar mereka dalam bursa kerja global maupun lokal.

Manfaat langsung yang dirasakan oleh peserta didik dan lulusan adalah peningkatan martabat ekonomi serta nilai tawar mereka di bursa kerja global maupun regional. Dengan kurikulum yang selaras dan validasi kemahiran teknis yang diakui secara luas, lulusan MAK tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja kelas dua, melainkan sebagai profesional muda yang siap pakai dengan portofolio keahlian yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini secara signifikan akan memperpendek masa tunggu kerja, meningkatkan peluang pendapatan yang layak, serta memberikan kepercayaan diri bagi para lulusan untuk berkompetisi di sektor-sektor strategis, terutama yang berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi mutakhir.

5. Manfaat Akademis dan Teoritis

Memperkaya khazanah literatur di bidang manajemen kebijakan pendidikan vokasi, khususnya dalam penerapan teori *Human Capital* dan *Skill-Biased Technological Change* (SBTC) pada institusi pendidikan berbasis agama di Indonesia.

Secara akademis, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakrawala literatur manajemen kebijakan pendidikan vokasi, khususnya dalam konteks institusi pendidikan berbasis agama di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teori *Human Capital*, *Skill-Biased Technological Change* (SBTC), dan *Triple Helix*, naskah ini menawarkan model konseptual baru mengenai bagaimana institusi pendidikan yang memiliki mandat ganda dapat beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Manfaat ilmiah ini menjadi pijakan penting bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dinamika antara nilai-nilai

karakter, keahlian teknis, dan fleksibilitas regulasi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di era ketidakpastian global.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Kerangka teori menyajikan teori-teori yang relevan dari ilmu sosial atau studi kebijakan *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia)

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Dalam konteks MAK, rendahnya daya saing terjadi karena investasi pendidikan yang diberikan tidak menghasilkan "kapital" (keterampilan praktis) yang relevan dengan kebutuhan pasar. Mismatch kurikulum menyebabkan akumulasi modal manusia menjadi tidak efisien, sehingga lulusan tidak memiliki nilai tawar di mata industri ([Ardhana dkk., 2025b](#)).

Dalam konteks pendidikan vokasi, teori ini menekankan bahwa kualitas modal manusia sangat ditentukan oleh relevansi antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi waktu dan tenaga siswa di MAK akan menjadi sia-sia secara ekonomi jika kurikulum yang diterapkan tidak menghasilkan nilai tambah (*added value*) yang diakui industri. Kegagalan MAK dalam menyelaraskan kurikulum berakibat pada "pemborosan modal" di mana lulusan memiliki ijazah formal namun tidak memiliki kapasitas produktif untuk menghasilkan pendapatan yang layak, sehingga menghambat mobilitas sosial ekonomi mereka ([Hanafi, 2013](#)).

Lebih jauh lagi, teori ini menyoroti bahwa pendidikan bukan sekadar proses "pemberian ijazah", melainkan proses akumulasi keahlian yang berfungsi sebagai sinyal (*signaling*) bagi pemberi kerja. Jika kurikulum MAK tidak sinkron dengan standar industri, maka ijazah yang dimiliki lulusan kehilangan daya "sinyalnya", yang pada akhirnya memaksa lulusan menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka (*underemployment*). Hal ini menciptakan inefisiensi makroekonomi di mana potensi SDM muda di daerah seperti Lampung tidak teroptimalisasi karena ketidakcocokan antara profil kompetensi dan kebutuhan riil sektor produktif.

2. *Skill-Biased Technological Change* (SBTC)

Teori SBTC menjelaskan bahwa kemajuan teknologi menggeser permintaan tenaga kerja ke arah individu yang memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan teknologi tersebut. Masalah "Lambatnya Adaptasi terhadap Disrupsi Teknologi" di MAK sangat relevan dengan teori ini. Ketika kurikulum tetap statis sementara teknologi berkembang pesat, terjadi kesenjangan keterampilan (*skill gap*) yang membuat lulusan lama-kelamaan tereliminasi dari pasar kerja karena kompetensi mereka tidak lagi dibutuhkan oleh mesin atau sistem modern. (A. A. M. Putri dkk., 2026a).

Di era disrupsi, permintaan terhadap pekerjaan rutin (yang biasanya diajarkan dalam kurikulum lama) menurun tajam karena digantikan oleh otomatisasi. Jika MAK terlambat mengadaptasi teknologi terbaru dalam kurikulumnya, maka lulusannya akan terjebak dalam kategori tenaga kerja "berketerampilan rendah" yang rentan terhadap pengangguran kronis. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan kurikulum bukan lagi soal pilihan materi, melainkan soal keberlangsungan relevansi lulusan di tengah kutub teknologi yang terus bergeser ([Jaya dkk., 2025b](#)).

3. Institutional *Theory & Organizational Inertia* (Inersia Institusi)

Teori ini menjelaskan mengapa organisasi besar, seperti birokrasi pendidikan nasional, cenderung sulit berubah dan kaku terhadap inovasi. "Prosedur Birokrasi dan Standarisasi Nasional yang Kaku" adalah bentuk dari inersia institusi, di mana struktur formal lebih mengutamakan kepatuhan terhadap aturan (*compliance*) daripada adaptasi terhadap lingkungan eksternal (industri). Hal ini menghalangi institusi pendidikan untuk melakukan transformasi kurikulum secara lincah (Jabar & Frinaldi, 2025a).

Inersia institusi menjelaskan mengapa birokrasi pendidikan cenderung mempertahankan status quo meskipun lingkungan eksternal (industri) telah berubah secara radikal. Seringkali, MAK terjebak dalam pola "isomorfisma," yaitu kecenderungan untuk hanya mengikuti standar formal demi keamanan administratif daripada melakukan inovasi substansial. Budaya birokrasi yang lebih menghargai kepatuhan dokumen daripada kualitas luaran (*outcome*) menciptakan penghalang bagi adaptasi kurikulum yang lincah. Teori ini menyarankan bahwa untuk memutus rantai ketidakefektifan, diperlukan reformasi struktural yang mampu melonggarkan kekakuan prosedur dan memberikan otonomi lebih besar bagi sekolah untuk merespons perubahan pasar (Jabar & Frinaldi, 2025b).

Inersia ini sering kali diperparah oleh ketergantungan pada jalur masa lalu (*path dependency*), di mana kebijakan kurikulum saat ini hanya merupakan kelanjutan dari pola lama yang sudah tidak relevan. Tanpa adanya tekanan kebijakan yang memaksa (seperti regulasi *co-design*), institusi cenderung memilih jalur yang paling sedikit resistensinya, yakni tetap menggunakan kurikulum lama. Teori ini mendukung perlunya "kewirausahaan institusional" di tingkat kementerian untuk menciptakan disrupsi positif yang memaksa birokrasi beralih dari sekadar kepatuhan administratif menuju orientasi kinerja dan daya saing lulusan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Link and Match* (Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja)

Konsep ini menekankan pentingnya keterkaitan fungsional antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Penyelarasan tidak hanya terbatas pada penempatan kerja, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan (penyusunan kurikulum), proses (pembelajaran praktis), hingga evaluasi (sertifikasi kompetensi). Tanpa sinergi ini, lulusan akan terus mengalami kegagalan saat memasuki lingkungan kerja yang sesungguhnya (Agustian dkk., 2024b).

Penerapan *link and match* yang sejati harus melampaui sekadar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) seremonial. Konsep ini menuntut adanya sinkronisasi yang mendalam di mana industri terlibat dalam setiap tahap, mulai dari penentuan kompetensi dasar hingga pengujian akhir. Tanpa adanya sinkronisasi ini, proses pendidikan di MAK akan terus berjalan di jalurnya sendiri tanpa pernah bertemu dengan standar dunia kerja. Efektivitas konsep ini diukur dari seberapa besar kurikulum sekolah mampu mencerminkan standar kerja nyata, sehingga masa transisi lulusan dari bangku sekolah ke dunia kerja dapat berlangsung secara mulus dan instan (Hertanto, 2026b).

Dalam tataran praktis, konsep ini memposisikan industri sebagai "kompas" bagi arah pendidikan di madrasah. Keterkaitan ini harus mencakup aspek *curriculum alignment*, di mana setiap mata pelajaran praktis memiliki rujukan langsung pada

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Keberhasilan konsep ini akan terlihat ketika profil lulusan MAK tidak lagi dianggap sebagai "orang luar" oleh industri, melainkan sebagai calon tenaga kerja yang sudah memiliki bahasa teknis dan etos kerja yang sama dengan apa yang dipraktikkan di lantai industri.

2. Kurikulum Berbasis Kebutuhan Pasar (*Demand-Driven Curriculum*)

Pendekatan ini menggeser paradigma pendidikan dari yang semula berfokus pada ketersediaan guru dan fasilitas sekolah (*supply-driven*) menjadi berfokus pada standar kompetensi yang diminta oleh pemberi kerja (*demand-driven*). Dalam konsep ini, profil lulusan disusun berdasarkan analisis jabatan (*job analysis*) yang nyata di industri, sehingga materi ajar selalu memiliki nilai guna yang tinggi bagi siswa. Pengembangan model kurikulum pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri (*demand-driven*) ([Ridwan Misbahudin & Asmaul, 2022](#)).

Konsep ini menempatkan industri sebagai "konsumen" utama yang harus didengarkan suaranya. Dalam pendekatan *demand-driven*, materi ajar tidak lagi bersifat statis namun terus bergerak mengikuti tren permintaan tenaga kerja. Hal ini memaksa MAK untuk keluar dari zona nyaman dan secara aktif melakukan pemindaian terhadap jenis pekerjaan baru yang muncul. Dengan menjadikan kebutuhan pasar sebagai kompas utama, madrasah dapat memastikan bahwa setiap detik yang dihabiskan siswa untuk belajar praktik akan berbuah pada penguasaan keahlian yang memang sedang dicari oleh perusahaan ([A. A. M. Putri dkk., 2026b](#)).

Lebih jauh lagi, konsep ini memerlukan mekanisme *Labor Market Intelligence* (LMI) di mana data mengenai tren pekerjaan dianalisis secara berkala untuk memperbarui silabus. Jika pasar kerja di Lampung saat ini sedang membutuhkan teknisi logistik berbasis digital, maka kurikulum MAK di wilayah tersebut harus segera melakukan kalibrasi ke arah sana. Pendekatan ini menghilangkan spekulasi dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap kompetensi yang diajarkan memiliki kaitan langsung dengan peluang penempatan kerja yang tersedia.

3. *Agile Curriculum* (Kurikulum Adaptif dan Fleksibel)

Dalam era disrupsi, kurikulum tidak boleh lagi bersifat statis dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dukungan konseptual *Agile Curriculum* menawarkan struktur yang fleksibel, di mana satuan pendidikan memiliki otonomi untuk menyisipkan modul-modul kompetensi baru (seperti literasi digital atau teknologi AI) tanpa harus menunggu perubahan Standar Nasional yang memakan waktu lama secara birokratis ([Ridwan Misbahudin & Asmaul, 2022](#)).

Ketangkasan (*agility*) dalam kurikulum berarti kemampuan untuk melakukan pembaruan modular secara cepat tanpa harus menunggu siklus perubahan kurikulum nasional yang biasanya memakan waktu lima hingga sepuluh tahun. Konsep ini mendukung gagasan bahwa kurikulum kejuruan harus memiliki "ruang bebas" yang dapat diisi dengan materi teknologi terbaru yang sedang tren. Dengan struktur yang lincah, MAK dapat memberikan respon cepat terhadap kemunculan teknologi AI atau digitalisasi industri, sehingga lulusan mereka selalu memiliki keunggulan kompetitif yang segar saat memasuki bursa kerja ([Fathurrahman dkk., 2024b](#)).

Fleksibilitas ini juga mencakup kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan konteks keunggulan lokal. Kurikulum yang *agile* memungkinkan MAK di daerah pesisir Lampung untuk memiliki fokus teknis yang berbeda dengan MAK di daerah pusat logistik, meskipun keduanya berada di bawah standar nasional yang sama. Hal ini memberikan ruang bagi otonomi guru dan sekolah untuk menciptakan

modul-modul pembelajaran yang unik, mutakhir, dan spesifik, yang pada akhirnya memberikan identitas keunggulan bagi lulusan madrasah tersebut.

4. *Work-Based Learning* (WBL - Pembelajaran Berbasis Kerja)

WBL adalah strategi pendidikan yang secara sengaja menghubungkan teori di kelas dengan praktik nyata di industri. Konsep ini mendukung gagasan bahwa keahlian praktis tidak bisa diajarkan secara murni di laboratorium sekolah, melainkan harus melalui pengalaman hands-on di lingkungan kerja yang sesungguhnya untuk membangun etos dan kompetensi teknis yang standar. (Raelin, J. A. (2008). *Work-based learning: Bridging knowledge and action in the workplace*. Jossey-Bass).

WBL menggeser fokus pembelajaran dari ruang kelas yang steril ke lingkungan kerja yang autentik. Melalui konsep ini, siswa tidak hanya belajar cara menggunakan alat, tetapi juga menyerap budaya kerja, manajemen waktu, dan standar keselamatan industri yang tidak mungkin diajarkan hanya melalui teori. Pembelajaran berbasis kerja memberikan konteks pada pengetahuan teoritis yang diterima di sekolah, sehingga pemahaman siswa menjadi lebih utuh dan mendalam. Pengalaman langsung di lapangan kerja inilah yang pada akhirnya membentuk kematangan profesionalitas siswa sebelum mereka benar-benar lulus (Raelin, 2008).

5. Pedagogi Vokasi (*Vocational Pedagogy*)

Pedagogi vokasi berfokus pada cara terbaik untuk mengajarkan keterampilan (*knowing-how*) daripada sekadar pengetahuan teoritis (*knowing-that*). Konsep ini mendukung perlunya penyesuaian porsi muatan kurikulum agar lebih menitikberatkan pada metode demonstrasi, simulasi, dan proyek (*project-based learning*), sehingga dominasi materi normatif-adaptif dapat diseimbangkan dengan penguasaan kompetensi kerja. (Lucas, B., Spencer, E., & Claxton, G. (2012).

Pedagogi vokasi menekankan pada metode pengajaran yang berorientasi pada tindakan atau *action-oriented learning*. Guru dalam konsep ini bukan lagi menjadi sumber pengetahuan tunggal, melainkan bertindak sebagai instruktur atau mentor yang memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan proyek nyata. Pendekatan ini mendukung penggunaan simulasi dan skenario dunia kerja di dalam laboratorium madrasah agar siswa terbiasa memecahkan masalah praktis. Dengan menerapkan pedagogi yang tepat, ketimpangan antara teori yang padat dan praktik yang minim dapat diseimbangkan, sehingga kompetensi teknis siswa dapat terasah secara optimal (Lucas et al., 2012).

METODOLOGI

Metodologi dalam kajian kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang logis, legal, dan aplikatif. Pendekatan yang digunakan berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen strategis dan realitas lapangan tanpa melalui proses pengumpulan data primer yang bersifat eksperimental. Berikut adalah rincian kerangka kerja yang digunakan:

1. Pendekatan Analisis

Kajian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan metode Analisis Kebijakan. Fokus utama adalah membedah konten regulasi, literatur akademik, dan data sekunder untuk memahami fenomena *mismatch* kompetensi dan merumuskan intervensi yang tepat di tingkat kementerian.

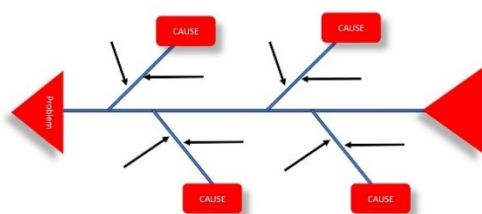
2. Sumber Informasi dan Data

Data yang diolah dalam telaah ini berasal dari dua kategori utama yaitu Studi Pustaka yang meliputi penelusuran karya ilmiah, jurnal bereputasi, dan buku teks yang membahas teori *Human Capital* serta dampak teknologi terhadap ketenagakerjaan. Kategori selanjutnya adalah melalui Tinjauan Regulasi (*Statutory Review*) meliputi pengkajian hierarki aturan hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hingga Keputusan Menteri Agama terbaru, guna memetakan celah hukum (*legal gap*).

3. Tahapan Identifikasi dan Bedah Masalah

Untuk mendapatkan gambaran masalah yang akurat, digunakan instrumen sebagai berikut matriks USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) digunakan untuk menentukan skala prioritas masalah berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan masalah jika tidak segera ditangani. Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) dilakukan untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara birokrasi yang kaku, kurikulum yang statis, dan rendahnya daya saing lulusan, sehingga solusi yang ditawarkan bersifat fundamental, bukan simptomatik.

4. Kerangka Evaluasi Alternatif Kebijakan



Pemilihan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, yang meliputi antara lain Efektivitas: Mengukur sejauh mana alternatif mampu mencapai tujuan teknis. Efisiensi: Menilai rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Kecukupan: Meninjau apakah solusi tersebut sudah menjawab akar masalah secara menyeluruh. Responsivitas: Melihat seberapa cepat kebijakan mampu menjawab tantangan disrupti teknologi. Kelayakan (*Appropriateness*): Memastikan kebijakan selaras dengan nilai karakter dan budaya di lingkungan Madrasah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di pasar kerja bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor sistemik yang saling berkelindan. Masalah utama terletak pada jurang pemisah antara kompetensi yang diajarkan di madrasah dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Kondisi ini menciptakan inefisiensi ekonomi di mana investasi pendidikan yang besar tidak berbanding lurus dengan keterserapan tenaga kerja (Mulyadi, 2020).

Secara fundamental, kurikulum yang diterapkan di MAK masih terjebak dalam paradigma *supply-driven*. Artinya, penentuan program keahlian dan materi ajar lebih banyak didasarkan pada ketersediaan guru dan fasilitas yang dimiliki madrasah, bukan atas dasar analisis kebutuhan tenaga kerja di industri. Hal ini menyebabkan lulusan sering kali memiliki keterampilan yang sudah usang atau tidak lagi relevan dengan standar operasional prosedur yang berlaku di perusahaan modern (Wagiran et al., 2021).

Ketidakselarasan ini diperparah oleh lemahnya mekanisme *link and match* yang seharusnya menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Banyak kerja sama antara MAK dan industri hanya bersifat seremonial di atas kertas (MoU), tanpa ada tindak lanjut nyata dalam penyelarasan kurikulum atau keterlibatan industri dalam

proses pengujian kompetensi. Akibatnya, profil lulusan yang dihasilkan tidak memiliki "bahasa teknis" yang sama dengan ekspektasi pemberi kerja (Sudira, 2022).

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory*. Jika keterampilan yang dipelajari siswa tidak memiliki nilai pasar, maka ijazah yang mereka miliki kehilangan daya tawar ekonominya. Lulusan MAK akhirnya harus bersaing di segmen pekerjaan informal atau menerima posisi yang jauh di bawah kualifikasi pendidikan mereka, yang memicu terjadinya pengangguran terdidik (Becker, 1993).

Kajian juga menemukan bahwa disrupsi teknologi menjadi tantangan yang sangat berat bagi institusi madrasah. Kemunculan Revolusi Industri 4.0 menuntut penguasaan teknologi digital dan otomatisasi, namun kurikulum MAK cenderung statis dan lambat dalam mengintegrasikan konten-konten mutakhir seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) atau internet untuk segala (*Internet of Things*). Keterlambatan ini membuat lulusan merasa asing dengan ekosistem kerja digital (Mustikawati et al., 2021).

Teori *Skill-Biased Technological Change* (SBTC) mengonfirmasi bahwa teknologi saat ini lebih memihak pada mereka yang memiliki keterampilan adaptif. Di MAK, keterbatasan sarana laboratorium dan kurangnya pembaruan materi praktik menyebabkan siswa hanya dilatih menggunakan alat-alat konvensional. Ketika mereka memasuki industri yang sudah menggunakan sistem komputerisasi tinggi, terjadi kegagalan teknis yang menurunkan produktivitas dan daya saing mereka (Acemoglu & Autor, 2011).

Selain masalah teknis, faktor birokrasi dan standarisasi nasional yang kaku menjadi penghambat utama inovasi. Prosedur administrasi yang panjang untuk melakukan revisi kurikulum membuat madrasah sulit melakukan penyesuaian materi secara lincah. Setiap perubahan harus menunggu keputusan dari tingkat pusat yang sering kali tidak sinkron dengan kecepatan perubahan teknologi di sektor swasta (Sujatmiko & Arifin, 2023).

Standarisasi yang bersifat "satu ukuran untuk semua" (*one size fits all*) juga mengabaikan karakteristik dan potensi ekonomi daerah. Padahal, kebutuhan industri di wilayah seperti Lampung, yang didominasi sektor logistik dan agrikultur, tentu berbeda dengan kebutuhan di wilayah industri manufaktur berat. Ketidakmampuan regulasi pusat dalam mengakomodasi keunikan lokal ini membuat lulusan MAK lokal tidak mampu mengisi ceruk pasar kerja di daerahnya sendiri (Nurkolis, 2022).

Dualisme regulasi antara Kementerian Agama dan kementerian teknis lainnya sering kali menciptakan kebingungan bagi pengelola madrasah. Fokus pada muatan keagamaan yang sangat padat di satu sisi, dan tuntutan standar kompetensi kejuruan yang tinggi di sisi lain, menciptakan beban belajar yang tidak proporsional. Akibatnya, jam praktik siswa sering kali tereduksi demi mengejar ketuntasan materi normatif dan adaptif (Zuhdiyah, 2021).

Hambatan institusional ini juga terlihat dari gejala inersia organisasi, di mana madrasah cenderung merasa aman dengan kurikulum lama selama masih memenuhi syarat akreditasi administratif. Budaya organisasi yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal ini membuat institusi pendidikan vokasi kehilangan arah dalam mencetak lulusan yang inovatif. Tanpa adanya tekanan kebijakan yang memaksa, madrasah akan terus melestarikan ketidaksesuaian ini (Scott, 2014).

Kajian juga menyoroti rendahnya kompetensi praktis para tenaga pendidik. Banyak guru produktif di MAK yang sudah lama tidak bersentuhan dengan praktik industri nyata, sehingga pengetahuan yang mereka berikan hanya bersifat teoritis dan ketinggalan

zaman. Tanpa adanya program magang guru yang berkelanjutan, transfer pengetahuan yang terjadi di kelas akan terus mengalami distorsi dan tidak sesuai dengan realitas industri terkini (Prianto et al., 2021).

Dari sisi *soft skills*, lulusan MAK sering kali dinilai kurang memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan etika kerja yang standar. Kurikulum yang terlalu fokus pada aspek teknis kognitif mengabaikan pembentukan karakter profesional yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh industri. Padahal, di tengah otomatisasi, keterampilan interpersonal justru menjadi nilai tambah yang membedakan manusia dengan mesin (Wagner, 2014).

Hasil pelacakan lulusan (*tracer study*) menunjukkan bahwa masa tunggu kerja lulusan MAK cenderung lebih lama dibandingkan lulusan SMK pada umumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa merek dagang "Madrasah Aliyah Kejuruan" belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan penuh dari sektor industri sebagai penyedia tenaga kerja handal. Hal ini menuntut adanya restrukturisasi total dalam sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kepuasan pengguna lulusan (UNESCO, 2021).

Kajian ini juga mengidentifikasi adanya kegagalan pada mekanisme umpan balik melalui pelacakan lulusan (*tracer study*) yang belum terintegrasi secara sistemik dalam siklus pengembangan kurikulum di MAK. Sejauh ini, pengumpulan data alumni cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif akreditasi, tanpa adanya analisis mendalam mengenai relevansi kompetensi yang digunakan di tempat kerja serta tingkat kepuasan industri sebagai pengguna lulusan. Lemahnya sistem pemantauan ini mengakibatkan madrasah kehilangan basis data empiris untuk melakukan koreksi mandiri (*self-correction*) terhadap materi ajar yang sudah usang, sehingga kesenjangan antara apa yang diajarkan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan terus melebar tanpa ada intervensi yang presisi. Tanpa rantai informasi yang kuat dari pasar kerja kembali ke ruang kelas, upaya penyelarasan kurikulum akan selalu bersifat reaktif dan tertinggal dibandingkan dinamika industri yang bergerak sangat cepat (Wardina et al., 2022).

Sebagai simpulan dari hasil kajian, seluruh permasalahan di atas bermuara pada perlunya mandat kebijakan yang tegas terkait *co-design* kurikulum. Tanpa keterlibatan langsung industri dalam merancang materi ajar, MAK akan tetap menjadi menara gading yang melahirkan lulusan dengan ijazah formal namun miskin kompetensi nyata. Oleh karena itu, intervensi regulasi untuk mewajibkan sinkronisasi kurikulum berbasis industri adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri lingkaran setan ketidakselarasan ini.

Pembahasan ini mengurai problematika rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) melalui tiga lensa teoretis utama: Human Capital Theory, Skill-Biased Technological Change (SBTC), dan Institutional Theory. Integrasi ketiga teori ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai dimensi ekonomi, teknologi, dan sistemik dari masalah tersebut.

1. Analisis Berdasarkan *Human Capital Theory*

Pembahasan pertama menitikberatkan pada investasi sumber daya manusia sebagai motor produktivitas. Menurut teori modal manusia, pendidikan vokasi seharusnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa yang secara langsung berkontribusi pada efisiensi ekonomi mereka di pasar kerja. Namun, dalam konteks MAK, terjadi kegagalan dalam mentransformasi proses belajar menjadi aset produktif karena kurikulum yang diajarkan tidak memiliki nilai ekonomi di mata industri (Becker, 1993).

Fenomena *mismatch* kompetensi mengakibatkan modal manusia yang dihasilkan madrasah menjadi "tidak likuid". Lulusan mungkin memiliki ijazah formal, tetapi mereka tidak memiliki kemahiran teknis yang dapat ditukarkan dengan upah yang kompetitif di industri. Hal ini menciptakan distorsi pasar di mana investasi besar pemerintah dan orang tua pada pendidikan tidak membuahkan hasil berupa ketersediaan tenaga kerja yang optimal (Mulyadi, 2020).

Selain itu, ijazah MAK sering kali gagal berfungsi sebagai "sinyal" yang kredibel bagi pemberi kerja. Dalam teori pensinyalan, ijazah seharusnya menjadi bukti bahwa pemegangnya memiliki kompetensi tertentu. Ketika industri menyadari bahwa kurikulum madrasah tidak selaras dengan standar operasional mereka, kredibilitas "sinyal" tersebut menurun, sehingga lulusan terpaksa menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka demi bertahan hidup (Hanushek & Woessmann, 2020).

Kondisi ini sangat terasa di wilayah seperti Lampung, di mana sektor produktif lokal menuntut keahlian spesifik yang belum tentu terwadahi dalam standar kurikulum nasional yang kaku. Kegagalan dalam mengakumulasi modal manusia yang tepat



guna ini mengakibatkan daerah kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa digerakkan oleh angkatan kerja muda madrasah yang produktif dan kompeten.

Secara fundamental, modal manusia yang tidak relevan ini memicu biaya peluang yang besar bagi negara. Setiap tahunnya, ribuan lulusan dilepas ke pasar kerja tanpa bekal keahlian yang presisi, yang pada akhirnya memperlebar angka pengangguran terdidik dan memperpanjang masa tunggu kerja bagi pemuda di lingkungan madrasah kejuruan.

2. Analisis Berdasarkan *Skill-Biased Technological Change* (SBTC)

Lensa teoretis kedua, SBTC, menjelaskan bahwa disrupsi teknologi telah menggeser permintaan tenaga kerja ke arah individu yang memiliki kemampuan literasi digital tinggi. Masalah adaptasi teknologi di MAK bukan sekadar keterlambatan pengadaan alat, melainkan kegagalan sistemik dalam memperbarui muatan kurikulum agar selaras dengan perubahan teknis di sektor industri (Acemoglu & Autor, 2011).

Era Industri 4.0 telah membawa otomatisasi ke berbagai lini pekerjaan vokatif. Ketika kurikulum MAK tetap fokus pada keterampilan manual konvensional sementara industri telah beralih ke sistem berbasis data dan kecerdasan buatan, maka terjadi polarisasi pasar kerja. Lulusan MAK tanpa sadar "didesain" untuk mengisi segmen pekerjaan rutin yang justru sedang menyusut akibat digitalisasi (Mustikawati et al., 2021).

Ketidakmampuan madrasah dalam merespons kecepatan disrupsi ini menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) yang sangat tajam. Siswa yang dilatih dengan metode usang tidak hanya kehilangan peluang kerja, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan alat-alat produksi modern. Hal ini menuntut adanya fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan integrasi teknologi terbaru secara modular dan instan.

SBTC menegaskan bahwa penguasaan teknologi adalah kunci keunggulan kompetitif. Tanpa adanya pembaruan materi praktik yang radikal, lulusan MAK

akan terus tereliminasi oleh mesin atau tenaga kerja dari institusi lain yang lebih adaptif. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kemahiran teknis yang mampu berkolaborasi dengan teknologi, bukan yang akan digantikan olehnya.

Akselerasi adaptasi teknologi di madrasah juga terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana yang standar. Padahal, sesuai prinsip SBTC, investasi pada teknologi pendidikan adalah prasyarat untuk menghasilkan lulusan yang relevan. Jika madrasah tetap beroperasi dengan fasilitas yang tertinggal, maka *skill gap* antara lulusan dan industri akan semakin lebar dan sulit untuk dijembatani di masa depan.

3. Analisis Berdasarkan *Institutional Theory* & Inersia Organisasi

Pembahasan ketiga menelaah sisi birokrasi melalui teori institusi yang menjelaskan mengapa perubahan kurikulum begitu sulit dilakukan. Inersia organisasi dalam struktur kementerian sering kali menghambat transformasi karena lebih mengutamakan kepatuhan administratif daripada kualitas luaran kompetensi. Madrasah terjebak dalam pola "isomorfisma," di mana mereka hanya meniru standar formal nasional agar terlihat patuh di mata regulator (Scott, 2014).

Kekakuan prosedur standarisasi nasional sering kali menjadi "pedang bermata dua". Di satu sisi memberikan kepastian mutu dasar, namun di sisi lain membunuh kreativitas dan ketangkasan satuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan industri lokal. Inersia birokrasi ini menciptakan ketergantungan pada jalur masa lalu (*path dependency*), di mana kurikulum yang tidak efektif tetap dipertahankan hanya karena proses perubahannya dianggap terlalu rumit dan birokratis (Sujatmiko & Arifin, 2023).

Gejala inersia ini juga terlihat pada dualisme pengaturan kurikulum yang membuat beban administratif madrasah menjadi berlipat ganda. Fokus pada kepatuhan dokumen kurikulum normatif sering kali menyita energi pengelola madrasah, sehingga upaya strategis untuk menjalin kemitraan desainer bersama (*co-design*) dengan industri menjadi terabaikan dan dianggap sebagai beban tambahan, bukan kebutuhan utama.

Untuk mengatasi hambatan institusional ini, diperlukan restrukturisasi otoritas yang memberikan ruang bagi madrasah untuk melakukan otonomi kurikulum sektoral. Tanpa adanya desentralisasi validasi materi kejuruan, madrasah akan terus berjalan lambat di tengah kecepatan dunia industri yang sangat dinamis. Kebijakan harus mampu memaksa institusi keluar dari zona nyaman birokrasi menuju orientasi kinerja yang berpusat pada kepuasan pengguna lulusan.

Dalam perspektif *Skill-Biased Technological Change* (SBTC), percepatan disrupsi teknologi tidak hanya menuntut penguasaan alat baru, tetapi juga mempercepat laju "usangnya" keterampilan (*skills obsolescence*). Bagi lulusan MAK, kegagalan kurikulum untuk mengintegrasikan kompetensi digital mutakhir berarti modal manusia yang mereka akumulasi selama masa pendidikan mengalami depresiasi nilai yang sangat cepat saat memasuki pasar kerja. Fenomena ini menciptakan beban ekonomi ganda: lulusan kehilangan peluang pada sektor dengan pertumbuhan tinggi, sementara industri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan ulang (*re-training*) guna menutup kesenjangan keterampilan tersebut. Tanpa adanya pembaruan modul yang bersifat *agile*, investasi pendidikan pada MAK berisiko menjadi "modal mati" yang tidak mampu menggerakkan produktivitas di tengah lanskap ekonomi digital yang sangat dinamis (Ismail et al., 2020).

Berdasarkan *Institutional Theory*, hambatan dalam penyelarasan kurikulum di MAK juga sering kali disebabkan oleh praktik dekling (*decoupling*), di mana terdapat pemisahan antara kebijakan formal yang diadopsi institusi dengan praktik operasional harian di kelas. Meskipun madrasah mungkin secara formal mengadopsi kerja sama industri demi memenuhi tuntutan legitimasi administratif—seperti untuk keperluan akreditasi—implementasi substansial dalam bentuk desain bersama (*co-design*) kurikulum sering kali tidak terjadi karena kuatnya inersia birokrasi internal. Budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada kepatuhan aturan (*compliance-oriented*) daripada hasil (*outcome-oriented*) menyebabkan inovasi kurikulum hanya berhenti pada tataran dokumen, tanpa benar-benar menyentuh transformasi metode pengajaran dan praktik siswa di laboratorium. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mampu menembus lapisan administratif ini guna memastikan bahwa kolaborasi industri benar-benar terintegrasi ke dalam struktur inti pembelajaran (Amruddin et al., 2022).

Sebagai simpulan analisis, integrasi ketiga teori ini menunjukkan bahwa solusi atas rendahnya daya saing lulusan tidak bisa hanya dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara peningkatan nilai ekonomi modal manusia, percepatan penguasaan teknologi digital, dan pendobrakan kekakuan birokrasi melalui regulasi mandat *co-design* kurikulum bersama industri guna menjamin relevansi masa depan lulusan MAK.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 merupakan landasan tertinggi pendidikan di Indonesia. Pasal 15 secara spesifik menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Hal ini melegitimasi bahwa kurikulum MAK harus berorientasi pada keterserapan kerja.
2. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah regulasi paling krusial yang mendukung penyelesaian masalah *link and match*. Perpres ini mewajibkan adanya penyelarasan kurikulum antara lembaga pendidikan vokasi dengan standar kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Regulasi ini memerintahkan agar industri terlibat aktif dalam penyusunan standar kompetensi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan fleksibilitas pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menjawab masalah "Birokrasi dan Standarisasi yang Kaku" dengan memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk melakukan adaptasi kurikulum yang lebih otonom dan sesuai dengan karakteristik keunggulan lokal serta kebutuhan industri terkini tanpa melanggar standar nasional.
4. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Inpres ini memerintahkan menteri-menteri terkait (termasuk Menteri Agama untuk MAK) untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui revitalisasi SMK/MAK yang berfokus pada sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri serta penyediaan sarana prasarana yang standar.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Peraturan ini adalah regulasi teknis terbaru yang mengatur fleksibilitas kurikulum di lingkungan Madrasah (termasuk MAK). KMA ini memberikan mandat bagi Madrasah untuk mengembangkan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang adaptif terhadap perkembangan

zaman dan kebutuhan peserta didik, sehingga menjadi solusi langsung atas hambatan birokrasi di tingkat sekolah.

6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpres Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Siskennas)
8. Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini mencakup beberapa batasan substansial yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis. Pertama, kajian ini sepenuhnya bersandar pada analisis data sekunder melalui studi pustaka dan telaah regulasi, sehingga tidak melibatkan data primer hasil observasi langsung maupun wawancara dengan para pelaku industri dan pengelola madrasah di lapangan. Kedua, lokus penelitian ini secara spesifik berfokus pada institusi Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga generalisasi temuan untuk sekolah menengah kejuruan umum (SMK) atau wilayah dengan karakteristik industri yang berbeda mungkin memerlukan penyesuaian. Terakhir, kajian ini menitikberatkan pada variabel kebijakan kurikulum, disrupsi teknologi, dan hambatan birokrasi, namun tidak mengeksplorasi variabel lain secara mendalam seperti aspek fluktuasi anggaran pendidikan, latar belakang sosial ekonomi siswa, maupun faktor psikologis tenaga pendidik yang juga memiliki kontribusi terhadap daya saing lulusan.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan secara teoretis maupun praktis dengan menghadirkan kerangka kerja kebijakan yang integratif bagi pengembangan pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Agama. Secara akademis, naskah ini memperkaya literatur mengenai aplikasi teori *Human Capital* dan *Skill-Biased Technological Change* (SBTC) dalam ekosistem madrasah yang memiliki keunikan mandat ganda antara pendidikan agama dan kejuruan. Secara praktis, kajian ini menawarkan rekomendasi operasional berupa mandat *co-design* kurikulum yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mendobrak inersia birokrasi dan mengakselerasi integrasi teknologi digital ke dalam materi ajar. Selain itu, kontribusi regional kajian ini menyediakan model penyalarsan pendidikan yang sensitif terhadap kebutuhan industri lokal di Lampung, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan keterserapan lulusan, mengurangi angka pengangguran terdidik, serta memperkuat martabat ekonomi lulusan madrasah di pasar kerja global.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama tentang Mandat *Co-Design* Kurikulum Bersama Industri.

Kebijakan ini berfungsi sebagai payung hukum nasional yang mewajibkan

seluruh Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) untuk menyusun Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang disahkan bersama oleh pimpinan madrasah dan perwakilan asosiasi industri terkait. Kebijakan ini dapat menghapus pendekatan *supply-driven*. Tanpa tanda tangan verifikasi dari mitra industri, kurikulum kejuruan tersebut dianggap tidak valid secara administratif untuk digunakan dalam proses akreditasi

Alternatif 2: Peraturan Menteri Agama tentang Implementasi Siswa Lulusan MAK memperoleh sertifikasi kompetensi bertahap (*micro-credentials*) yang diakui oleh industri.

Peraturan Menteri Agama ini dirancang untuk mentransformasi struktur kurikulum MAK yang semula bersifat paket tahunan statis menjadi sistem unit kompetensi yang dinamis dan fleksibel. Melalui regulasi ini, madrasah diberikan otonomi khusus untuk mengintegrasikan modul-modul keahlian terbaru sebesar 20-30% dari total jam pelajaran, seperti teknologi kecerdasan buatan, digitalisasi industri, atau keterampilan teknis spesifik lainnya, tanpa harus menunggu siklus revisi kurikulum nasional yang memakan waktu lama. Implementasi kebijakan ini memungkinkan siswa memperoleh sertifikasi kompetensi bertahap (*micro-credentials*) yang diakui oleh industri di setiap akhir modul, sehingga lulusan MAK memiliki portofolio keahlian yang mutakhir, relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis, serta mampu merespons disrupsi teknologi secara instan

Alternatif 3: Peraturan Menteri Agama tentang "Praktisi Mengajar" sebagai Syarat Kelulusan Program.

PMA ini mewajibkan integrasi minimal 50 jam pelajaran per semester yang diajarkan langsung oleh praktisi dari dunia industri (baik secara luring maupun daring). Kebijakan ini untuk mengatasi kesenjangan kompetensi guru. Regulasi ini memposisikan praktisi industri bukan sekadar tamu, melainkan bagian integral dari tim pengajar resmi di MAK.

Alternatif 4: Peraturan Menteri Agama tentang Standarisasi Penjadwalan Sistem Blok dan *Work-Based Learning* (WBL) Berbasis Ekospiritual

Kebijakan ini mengubah regulasi pengaturan jam belajar di Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) dari model jam pelajaran harian yang terfragmentasi (45 menit per sesi) menjadi sistem blok (misalnya: 2 minggu penuh praktik industri, 1 minggu materi umum). Memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mencapai tingkat kemahiran (*mastery*) dalam satu keahlian praktis tertentu tanpa terputus oleh mata pelajaran normatif-adaptif.

Alternatif 5: Peraturan Menteri Agama tentang Desentralisasi Otoritas Validasi Kurikulum Sektoral.

Kebijakan ini Melimpahkan wewenang validasi dan penyesuaian materi kejuruan dari Kementerian Pusat ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) atau Komite Vokasi Daerah. Sehingga dapat memangkas prosedur birokrasi yang panjang. Dengan validasi di tingkat daerah, kurikulum Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) dapat disesuaikan secara instan dengan potensi ekonomi dan kebutuhan industri spesifik di wilayah tersebut.

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, kemudian dianalisis berdasarkan pada tiga kriteria utama: Efektivitas, Kelayakan (Feasibility), dan Dampak (Impact). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Responsivitas	Kelayakan	Tepat	Total Skor
1	Peraturan Menteri Agama tentang Mandat <i>Co-Design</i> Kurikulum Bersama Industri.	5	3	5	5	5	5	28
2	Peraturan Menteri Agama tentang Implementasi Siswa Lulusan MAK memperoleh sertifikasi kompetensi bertahap (<i>micro-credentials</i>) yang diakui oleh industri.	4	5	4	5	4	5	25
3	Peraturan Menteri Agama tentang Regulasi "Praktisi Mengajar" sebagai Syarat Kelulusan Program.	5	4	3	5	4	4	24
4	Peraturan Menteri Agama tentang Standarisasi Penjadwalan Sistem Blok dan <i>Work-Based Learning</i> (WBL) Berbasis Ekospiritual	5	4	3	4	4	4	20
5	Peraturan Menteri Agama tentang Desentralisasi Otoritas Validasi Kurikulum Sektoral.	3	5	4	4	4	4	24

Analisis Kriteria Utama

1. Alternatif 1 Peraturan Menteri Agama tentang Mandat *Co-Design* Kurikulum Bersama Industri. - Peringkat I

Kekuatan: Memiliki tingkat Ketepatan (Appropriateness) dan Kecukupan (Adequacy) tertinggi karena memberikan landasan hukum yang kuat secara nasional. Kebijakan ini mampu menjawab akar masalah Ketidakselarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri (*Mismatch*) secara menyeluruh.

Kelemahan: Skor Efisiensi sedang karena proses penyusunan regulasi di tingkat kementerian membutuhkan waktu dan birokrasi yang panjang.

2. Alternatif 2 Peraturan Menteri Agama tentang Implementasi Siswa Lulusan MAK memperoleh sertifikasi kompetensi bertahap (*micro-credentials*) yang diakui oleh industri - Peringkat II

Kekuatan: Sangat Efisien dan Responsif karena dapat langsung dieksekusi oleh Kepala Kanwil tanpa menunggu perubahan regulasi pusat. Ini adalah instrumen praktis sebagai transformasi struktur kurikulum dari model paket tahunan menjadi

model modular yang lincah.

Kelemahan: Tanpa adanya PMA, keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada komitmen individu Kepala Kanwil.

3. Alternatif 3 Peraturan Menteri Agama tentang "Praktisi Mengajar" sebagai Syarat Kelulusan Program - Peringkat III

Kekuatan: Memiliki skor Responsivitas tertinggi karena mengatasi kesenjangan kompetensi guru. Regulasi ini memposisikan praktisi industri bukan sekadar tamu, melainkan bagian integral dari tim pengajar resmi di Madrasah Aliyah Keterampilan.

Kelemahan: Tanpa adanya PMA, keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada komitmen individu Kepala Kanwil.

4. Alternatif 4 Peraturan Menteri Agama tentang Standarisasi Penjadwalan Sistem Blok dan *Work-Based Learning* (WBL) Berbasis Ekospiritual - Peringkat V

Kekuatan: Sangat kuat dalam aspek Efektivitas pengaturan jam belajar di Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK).

Kelemahan: Kecukupan rendah jika waktu yang cukup bagi siswa untuk mencapai tingkat kemahiran (*mastery*) dalam satu keahlian praktis tertentu terputus oleh mata pelajaran normatif-adaptif..

5. Alternatif 5 Peraturan Menteri Agama tentang Desentralisasi Otoritas Validasi Kurikulum Sektoral - Peringkat IV

Kekuatan: Paling Efisien karena dengan melimpahkan wewenang validasi dan penyesuaian materi kejuruan dari Kementerian Pusat ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) atau Komite Vokasi Daerah dapat memangkas prosedur birokrasi yang panjang.

Kelemahan: Dampaknya bersifat jangka panjang sehingga skor Efektivitas untuk menangani isu mendesak saat ini dinilai paling rendah dibanding alternatif lainnya.

Berdasarkan analisis skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah Peraturan Menteri Agama tentang Mandat *Co-Design* Kurikulum Bersama Industri sebagai payung hukum nasional yang mewajibkan seluruh Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) untuk menyusun Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang disahkan bersama oleh pimpinan madrasah dan perwakilan asosiasi industri terkait.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap problematika yang ada, dapat disimpulkan bahwa rendahnya daya saing lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam menyinkronkan output pendidikan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja yang sangat cepat. Ketidakselarasan kurikulum (*mismatch*) yang masih bersifat *supply-driven* menyebabkan investasi modal manusia tidak terkonversi menjadi produktivitas ekonomi yang nyata, sementara lambatnya adaptasi terhadap disrupsi teknologi membuat kompetensi lulusan cepat usang sebelum mereka memasuki bursa kerja. Kondisi ini diperparah oleh inersia institusional berupa prosedur birokrasi dan standarisasi nasional yang kaku, yang selama ini membelenggu fleksibilitas madrasah untuk melakukan inovasi materi ajar secara mandiri dan lincah.

Solusi fundamental untuk memutus siklus ketidakselarasan ini adalah melalui transformasi kebijakan yang berfokus pada mandat desain bersama (*co-design*)

kurikulum antara pihak madrasah dengan mitra industri atau asosiasi profesi. Dengan mengintegrasikan model kurikulum yang adaptif, modular, dan berbasis pada permintaan nyata (*demand-driven*), MAK dapat memberikan ruang bagi penguasaan teknologi mutakhir serta pengakuan kemahiran teknis yang diakui secara luas oleh sektor swasta. Langkah strategis ini tidak hanya akan merampingkan hambatan administratif yang bersifat statis, tetapi juga memastikan bahwa setiap unit kompetensi yang diajarkan memiliki relevansi langsung dengan standar operasional prosedur yang berlaku di dunia kerja modern.

Implementasi rekomendasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tawar dan relevansi ekonomi lulusan madrasah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan di daerah seperti Lampung. Melalui sinergi yang kuat antara regulasi pusat dan kebutuhan industri lokal, MAK tidak hanya akan mencetak lulusan dengan kedalaman spiritualitas keagamaan, tetapi juga tenaga kerja profesional yang memiliki keunggulan kompetitif di era digital. Pada akhirnya, penguatan landasan kebijakan ini akan berkontribusi signifikan pada penurunan angka pengangguran terdidik dan memastikan bahwa lulusan madrasah mampu menjadi aktor kunci dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Mandat Co-Design Kurikulum Bersama Industri sebagai payung hukum yang mewajibkan seluruh Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) melakukan sinkronisasi dan penyusunan kurikulum melalui mekanisme *co-design* bersama mitra industri atau asosiasi profesi sebagai syarat mutlak legalitas dokumen operasional madrasah. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai ketidakselarasan kompetensi (*mismatch*) dengan mengubah paradigma pembelajaran dari yang semula berbasis ketersediaan sumber daya sekolah (*supply-driven*) menjadi berbasis kebutuhan nyata pasar kerja (*demand-driven*), sehingga setiap modul keahlian praktis yang diajarkan memiliki pengakuan langsung dari sektor industri dan secara signifikan mampu meningkatkan daya saing serta keterserapan lulusan MAK di dunia kerja yang dinamis.

REFERENSI

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In *Handbook of Labor Economics* (Vol. 4, pp. 1043-1171). Elsevier.
- Affandi, M. (2025). *Analisis kesiapan dan hambatan partnership MAK-DUDI*. ResearchGate.
- Ardhana, et al. (2025). Attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control as determinants of accounting students' career decision-making in the digital era. *ResearchGate Publication*.
- Badrudin, B., & Zaqiah, Q. Y. (2024). Analisis kebijakan standarisasi nasional pendidikan pada institusi madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

- Jaya, D. J., dkk. (2025). Peluang dan tantangan pendidikan vokasional menghadapi era revolusi industri 4.0. *ResearchGate Publication*.
- Latifah, U., Yulastri, A., Yuliana, & Fiandra, Y. A. (2024). Pengembangan kurikulum pendidikan teknologi vokasi berbasis kewirausahaan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 di bidang teknologi manufaktur. *Jurnal Al-Qalam*, 6(4), 4204–4215.
- Mulyadi, M. (2020). Relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 152-165.
- Nainggolan, F. A., & Budiman, M. A. (2024). Analisis potensi dan resiko bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 6(2), 95–108.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Us'an, U., & Sanaya, U. (2026). Fenomena pengangguran dan kemiskinan di Indonesia: Tantangan pembangunan sumber daya manusia di era modern. *Jurnal Sumber Daya Manusia Digital (JSMD)*, 3(4), 249-260.
- Wagner, T. (2014). *The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need—and what we can do about it*. Basic Books.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

